

## BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

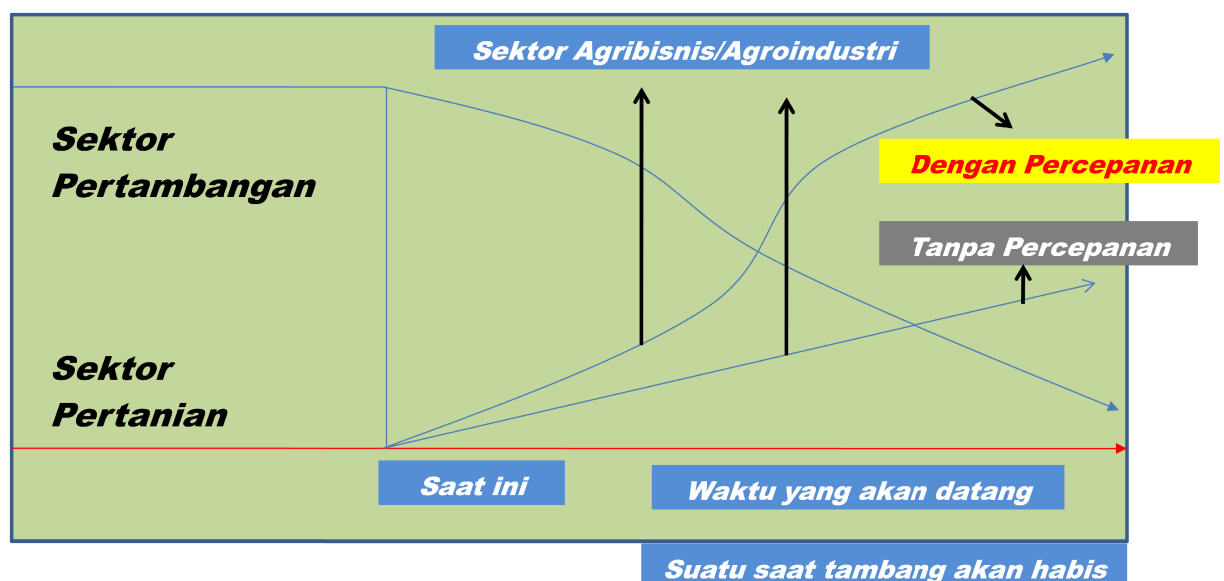
### A. Strategi

Strategi yang diterapkan adalah **Triple Strategi** meliputi pendekatan sektoral, pendekatan spasial, dan pendekatan manusia.

#### Strategi 1 Pendekatan Sektoral

Pendekatan sektoral pada intinya memperhatikan dan memprioritaskan subsektor kur Sampai saat ini dan beberapa tahun ke depan, struktur ekonomi Kaltim masih berbasis t minyak dan gas serta sektor industri jasa yang terkait tambang dan migas. Sebagai sumberdaya tak terbahakan **Non Renewable Resources**, minyak dan gas tersebut suatu saat akan habis. Kaltim harus sedini mungkin mempersiapkan “Lokomotif ekono yang berbasis pada sumberdaya terbahakan **Renewable Resources** yang potensialnya agribisnis

Gambar 2.  
Strategi Pendekatan Sektoral



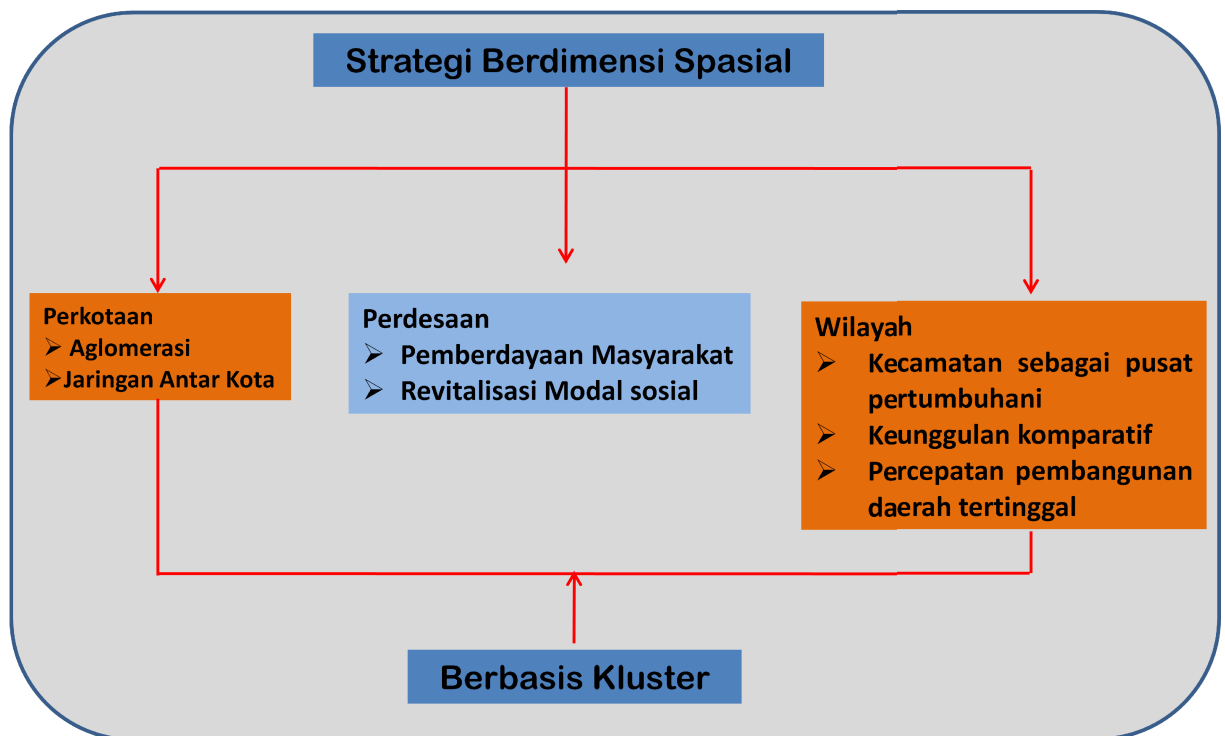
### Revitalisasi Sektor Unggulan

Menempatkan kembali dan membangun komitmen tentang arti penting sektor unggulan, dan peningkatan kinerja sektor unggulan dalam pembangunan daerah. Revitalisasi dilakukan dengan tiga pendekatan **pro-growth**, **pro-poor** dan **pro-employment**. Revitalisasi dilakukan dengan bertumpu pada peningkatan daya saing, orientasi kerakyatan, desentralisasi dan berkesinambungan.

### Strategi Pendekatan Spasial

Strategi berdimensi spasial di Kaltim perlu menitikberatkan pada strategi pengembangan perkotaan, pengembangan perdesaan dan pengembangan wilayah. Ketiga strategi ini bermuara pada strategi pengembangan kawasan berbasis kluster.

Gambar 8.  
Strategi Pendekatan Spasial



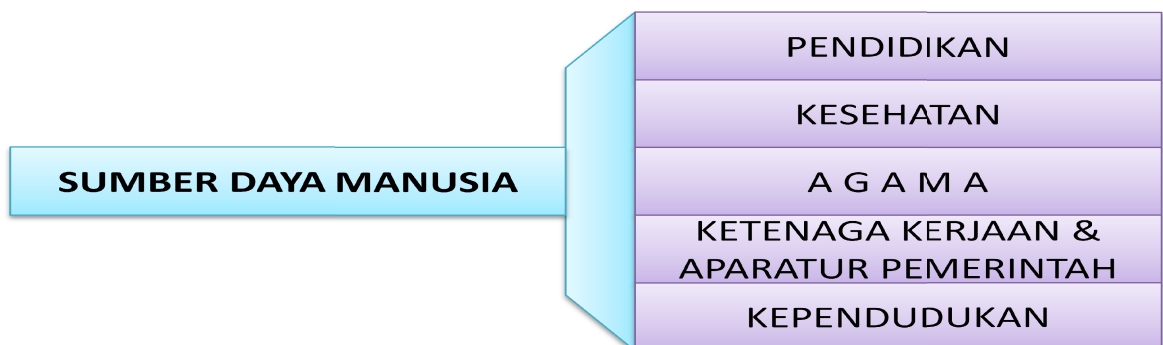
**Gambar 4.**  
**Keterkaitan Kebijakan, Strategi, Program, Tujuan serta Sasaran**



### Strategi 3. Pendekatan Manusia

Penekanan Investasi pada manusia diyakini merupakan basis dalam meningkatkan produktivitas produksi secara total. Kualitas manusia yang meningkat merupakan prasyarat utama dalam proses produksi dan memenuhi tuntutan masyarakat industrial. Pendekatan manusia sebagai subyek pembangunan menekankan pada pentingnya pemberdayaan (empowerment) manusia yaitu kemampuan manusia untuk mengaktualisasikan segala potensinya.

**Gambar 5.**  
**Strategi Pendekatan Manusia**



Peningkatan mutu sumberdaya manusia Kaltim mencakup dalam 5 aspek yakni peningkatan mutu pendidikan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas akhlak dan keimanan, peningkatan kualitas ketenagakerjaan dan aparatur pemerintah serta pendudukan.

## B. Arah Kebijakan

**Menciptakan Kaltim yang Aman Demokratis Damai Didukung Pemerintahan Bersih dan Berwibawa.**

### 1. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance).

#### Strategi 1 Peningkatan Tata Pemerintahan yang Baik

*Arah Kebijakan :*

- 1) Peningkatan koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan yang berkualitas
- 2) Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian penyelenggaraan upaya penyempurnaan peraturan pendukung.
  - a. Peningkatan Pelayanan Publik.
  - b. Penyempurnaan Sistem Pelayanan.
  - c. Peningkatan Kinerja Layanan Pemerintah.
  - d. Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik.
  - e. Mengidentifikasi Bidang rawan Korupsi.
  - f. Pengawasan dan Pelayanan Pemerintah.
  - g. Penyempurnaan Sistem Pelayanan Manajemen Keuangan Daerah dan Pengadaan Barang dan Jasa.
  - h. Mendorong Penyerasian Perantara Pelayanan Publik.
- 3) Peningkatan Implementasi Prinsip Good Governance dalam Kepemerintahan Daerah.

#### Strategi 2 Peningkatan Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas SKPD.

*Arah Kebijakan*

- 1) Memberikan pembinaan terhadap unit satuan kerja untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam upaya meningkatkan system akuntabilitas kinerja agar menjadi organisasi yang kapabel dan akuntabel.
- 2) Melakukan pembinaan terhadap unit satuan kerja melalui pelaksanaan pengawasan.

**Strategi 3 Peningkatan Peran Pengawasan.***Arah Kebijakan*

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana pengawasan.
- 2) Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah termasuk pengawasan reguler
- 3) Terlaksananya koordinasi pengawasan antara pengawasan eksternal dan aparat pengawas internal pemerintah.
- 4) Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa/aparatur pengawasan.
- 5) Terlaksananya tata kebijakan sistem, struktur dan prosedur pengawasan.
- 6) Peningkatan intensitas penanganan pengaduan masyarakat.

**2. Penanggulangan Korupsi****Strategi 1: Peningkatan Upaya Pencegahan, Percepatan Pemberantasan dan Penindakan Kasus Korupsi.***Arah Kebijakan :*

- 1) Penerapan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (PKAD) Tahun 2007 – 2012
- 2) Penyempurnaan sistem pelayanan publik dan system pengadaan barang dan jasa
- 3) Peningkatan pengawasan kinerja pelayanan pemerintahan
- 4) Penyempurnaan sistem manajemen keuangan negara dalam pelaksanaan politik integritas, reformasi sistem perencanaan, anggaran, pengembangan E government dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
- 5) Pengembangan system pengawasan serta peningkatan intensitas dan efektifitas pengawasan aparatur melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional, pengawasan masyarakat.

**3. Penanganan Narkoba****Strategi 1: Peningkatan Kelembagaan, Sarana dan Prasarana dan Partisipasi Masyarakat dalam upaya Pencegahan dan Penghambat Penyalahgunaan Narkoba.***Arah Kebijakan :*

- 1) Peningkatan komitmen yang tinggi dari segenap stakeholdes daerah dan komponen masyarakat untuk memerangi narkoba.
- 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Institusi Penanggulangan narkoba
- 3) Peningkatan Penyuluhan tentang dampak narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya untuk semua unsur di masyarakat.
- 4) Pembentukan kelompok Peduli Narkoba sebagaimana yang sudah dilakukan lewat kegiatan PKBI Kaltim. KPAD (Kelompok Peduli AIDS Daerah Kaltim) dapat membantu secara lebih aktif dalam membinanya.

- 5) Peningkatan pengawasan di semua tempat, baik di lingkungan keluarga, tempat hiburan, sekolah dan instansi pemerintah.
- 6) Peninjauan kembali keberadaan tempat hiburan yang ada di tengah kota
- 7) Pendirian unit pelaksana teknis pelayanan narkoba dan tempat pengobatan baik dengan nuansa keagamaan maupun dengan nuansa medis.
- 8) Mengoptimalkan tugas operasional aparat penyidik pada jajaran kepolisian dalam rangka meminimalisasi peredaran gelap narkoba.
- 9) Perwujudan supremasi hukum di narkoba.

#### 4. Kesbangpol

##### **Strategi 1 Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilu Kegiatan di Daerah.**

###### *Arah Kebijakan :*

- 1) Peningkatan partisipasi masyarakat untuk mempererat rasa persaudaraan dan melestarikan kearifan lokal melalui prinsip musyawarah dan mufakat.
- 2) Menciptakan Aparat yang adil dalam penyelesaian sengketa
- 3) Peningkatan kinerja Satpol PP dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 4) Peningkatkan pemahaman dan pelaksanaan serta penegakan Aturan agama dan Undang-Undang Negara .
- 5) Peningkatan fungsi Pos Kepolisian Masyarakat (Polmas) dalam rangka menjaga keamanan Pemilu yang dibuat berjenjang searah dari tingkat Desa sampai Kecamatan.
- 6) Peningkatan partisipasi Polda Kalimantan Timur, TNI, Kodam VI Tanjung Pura Kalimantan dan Anggota LINMASORMAS Kepemudaan.

##### **Strategi 2 Pemantapan Wawasan Kebangsaan dalam Kesatuan NKRI serta Pemahaman/Sikap Perilaku Masyarakat Berdasarkan Ideologi Pancasila dan 1945.**

###### *Arah Kebijakan :*

- 1) Peningkatan pemahaman dan pemantapan wawasan kebangsaan serta ketahanan bangsa dalam berbagai aspek kehidupan.
- 2) Peningkatan pendidikan politik kepada masyarakat.
- 3) Pengembangan sistem, metode dan materi dalam rangka peningkatan kewaspadaan.

## 5. Pembangunan Daerah Perbatasan

### **Strategi 1** Peningkatan Pembangunan Wilayah Perbatasan dalam upaya Percepatan Pembangunan.

*Arah Kebijakan :*

- 1) Meningkatkan aksesibilitas di wilayah perbatasan, baik dengan melakukan pembangunan infrastruktur perhubungan darat, laut dan udara dalam rangka membuka isolasi wilayah perbatasan.
- 2) Peningkatan perekonomian masyarakat di wilayah perbatasan, terutama sektor perdagangan dan sektor ekonomi lainnya seperti pertanian dan perkebunan.
- 3) Meningkatkan pertumbuhan ~~simpul~~ ekonomi untuk mengembangkan sektor perkebunan, tanaman pangan dan peternakan yang disesuaikan dengan keunggulan komparatif wilayah ~~melalui~~ <sup>lewat</sup> Green Belt dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan di sekitarnya.
- 4) Meningkatkan perluasan pelayanan pendidikan dan kesehatan melalui pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan secara lebih memadai.
- 5) Penyerasian pengembangan ~~daerah~~ <sup>wilayah</sup> perbatasan Kalimantan Timur dengan pembangunan Negara bagian di Malaysia seperti ; Kecamatan Sebatik dan Kuching, Tawao, Kecamatan Lon Nawang dengan Kavit, Long Bawan dengan Long Pasia.
- 6) Meningkatkan komitmen dan kerjasama antar daerah maupun ~~antar~~ <sup>antar</sup> negara dalam bidang sosial ekonomi dan keamanan wilayah perbatasan.
- 7) Mengupayakan terbentuknya kelembagaan yang secara khusus menaungi kegiatan pembangunan wilayah perbatasan.
- 8) Memanfaatkan fungsi hutan lindung sebagai isu global dengan mencanangkan fungsi hutan lindung di kawasan kayan mentarang sebagai bagian ~~pari~~ <sup>pari</sup> paru dunia, sehingga Negara ~~maju~~ <sup>maju</sup> mempunyai kewajiban memberikan kompensasi bagi pemerintah daerah (carbon trade).
- 9) Mengembangkan sektor pariwisata di kawasan perbatasan dengan khusus pengembangan objek wisata alam dan budaya ~~(ecotourism)~~ <sup>(ecotourism)</sup>.
- 10) Meningkatkan kegiatan operasi keamanan di wilayah perbatasan baik darat maupun laut serta peningkatan sarana dan prasarana penunjangnya.

## 6. Pemerintahan Umum

### **Strategi 1** Peningkatan Kinerja ~~Koordinasi~~ <sup>Koordinasi</sup> Pemerintahan serta Pengembangan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

*Arah Kebijakan :*

- 1) Pelaksanaan system pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah yang optimal.
- 2) Peningkatan pengembangan kapasitas pemerintahan daerah.
- 3) Pelaksanaan ~~koordinasi~~ <sup>koordinasi</sup> dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- 4) Peningkatan penerimaan daerah.

- 5) Peningkatan peran Gubernur dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- 6) Peningkatan pelayanan administrasi pejabat Negara.
- 7) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemilu dan pemilu kepala daerah.
- 8) Penataan administrasi kependudukan.
- 9) Peningkatan kapasitas penyelenggaraan administrasi dan kependudukan.
- 10) Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.

### **Strategi 2 Peningkatan Kerjasama dalam Negeri dan Luar Negeri serta Antara Pemerintah dan Lembaga**

*Arah Kebijakan :*

- 1) Peningkatan hasil kerjasama dalam negeri.
- 2) Peningkatan hasil kerjasama luar negeri.
- 3) Peningkatan hasil kerjasama antar pemerintah dan lembaga.

### **Strategi 3 Pengembangan dan Peningkatan Penataan Wilayah Administrasi Pemerintahan**

*Arah Kebijakan :*

- 1) Meningkatkan penyelesaian persengketaan tata batas wilayah administrasi antara daerah Kabupaten/Kota, antar Provinsi dan antar Negara di Kaltim.
- 2) Pelaksanaan pengembangan wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Peningkatan optimalisasi penyelenggara penataan batas wilayah.
- 4) Peningkatan efektivitas pemanfaatan sumberdaya potensial melalui kerjasama.
- 5) Peningkatan efektivitas penyelenggaraan/pengembangan dan kerjasama melalui evaluasi dan pengendalian.

### **Strategi 4 Peningkatan Pengembangan Aparatur Daerah dan Efisiensi Organisasi Perangkat Daerah, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis.**

*Arah Kebijakan :*

- 1) Penyempurnaan system manajemen SDM dan pembinaan aparatur dalam pengembangan system pembinaan pegawai
- 2) Pelaksanaan reformasi birokrasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
- 3) Peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja
- 4) Pemerataan pendistribusian pegawai daerah terpencil dan perbatasan.
- 5) Pengembangan institusi dan peningkatan komitmen pimpinan birokrasi dalam mendukung peningkatan kualitas pegawai.



- 6) Pengembangan sarana dan prasarana kediklatan yang representatif sesuai dengan standar dan kebutuhan kediklatan baik gedung, kantor, kelas, asrama dan peralatan penunjang pembelajaran lainnya.
- 7) Peningkatan aparatur kediklatan baik kuantitas, maupun peningkatan kualitas dengan memiliki kompetensi dan sertifikasi ahli dalam pengelolaan kediklatan.
- 8) Peningkatan kualitas manajemen berbasis kinerja.
- 9) Penataan organisasi dan tata laksana pemerintahan berdasarkan sarjana lulusan S1 Pemerintahan Integratif (PIN) dalam kepegawaian bagi Kabupaten Kota.
- 10) Pembinaan dan pengembangan aparatur pendidikan dan dinas.
- 11) Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.

#### **Strategi 5 Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Kearsipan.**

*Arah Kebijakan :*

- 1) Peningkatan system administrasi kearsipan.
- 2) Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.
- 3) Pemeliharaan sarana dan prasarana kearsipan.
- 4) Peningkatan kualitas pelayanan informasi kearsipan.
- 5) Peningkatan layanan jasa teknis kearsipan antar lembaga (pemerintah, swasta masyarakat).

#### **Strategi 6 : Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)**

*Arah Kebijakan:*

- 1) Pengembangan dan penguatan sistem informasi statistik yang bermutu, akurat, tepat waktu, mutakhir, terbuka, terpecaya, berbasis teknologi informasi dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan; pengembangan riset dan ilmu pengetahuan dan teknologi dan pengambilan keputusan, serta mendukung peningkatan mutu pelayanan publik.
- 2) Pengembangan dan penguatan pusat data dan sistem informasi geografi berbasis teknologi informasi dalam mendukung penataan ruang dan perencanaan pembangunan wilayah secara terpadu.
- 3) Peningkatan mutu sumber daya manusia dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4) Pengembangan dan penguatan lembaga penelitian dan pengembangan.

**Strategi 7 : Pemanfaatan dan penggunaan hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai dasar dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.**

*Arah Kebijakan:*

- 1) Pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah
- 2) Pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian serta pengembangan IPTEK dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah secara efektif dan efisien.
- 3) Pemanfaatan hasil penelitian dalam peningkatan mutu layanan sebagai dasar peningkatan kesejahteraan masyarakat
- 4) Penyebarluasan hasil penelitian dan pengembangan IPTEK kepada masyarakat secara mudah, murah dan tanpa hambatan.

**Strategi 8 : Peningkatan dan Penguatan kerjasama antara pemerintah daerah, perguruan tinggi dan swasta dalam pengembangan riset unggulan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.**

*Arah Kebijakan:*

- 1) Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai dalam penelitian dan pembangunan.
- 2) Peningkatan kerjasama bidang penelitian dan pengembangan berbasis IPTK terapan dengan berbagai lembaga penelitian masyarakat.

**Strategi 9 : Peningkatan Kualitas Penanggulangan Bencana Perlindungan Masyarakat**

*Arah Kebijakan:*

- 1) Meningkatnya kualitas penanganan dan penanggulangan bencana melalui pencegahan dini, pengurangan resiko bencana termasuk kesiapsiagaan perongatan dini dan mitigasi .
- 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dalam rangka penanggulangan bencana.
- 3) Peningkatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
- 4) Peningkatan kualitas Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP).

## 7. Hukum

**Strategi 1 Peningkatan Pembangunan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Hukum**

*Arah Kebijakan :*

- 1) Peningkatan Pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana hukum, khusus di daerah perbatasan dan daerah rawan lainnya.

- 2) Penyediaan sarana dan prasarana hukum di wilayah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Kecamatan yang terdapat Kodim, Polres/ta dan wilayah kecamatan yang terdapat Koramil dan Polsek.
- 3) Pelaksanaan produksi hukum daerah (PROLEGDA).
- 4) Penataan dan penetapan produk hukum daerah.
- 5) Peningkatan pembinaan dan pengembangan produk hukum dan HAM.
- 6) Peningkatan Sumberdaya aparatur di bidang hukum.
- 7) Peningkatan dan pengembangan dokumentasi hukum.
- 8) Pembinaan dan pengawasan produk hukum Kabupaten /Kota.

### **Strategi 2 Peningkatan Perangkat Hukum dan Penegakkan Hukum**

#### *Arah Kebijakan :*

- 1) Menurunkan kasus tindak pelanggaran hukum, tingkat kesadaran hukum masyarakat dapat ditingkatkan dan kasus hukum dapat diselesaikan secara tuntas dan adil dengan semakin adanya kesadaran dan budaya hukum di masyarakat
- 2) Penegakan hukum dan pelayanan hukum akan semakin bermutu, adil, tanpa diskriminasi dan bias gender.
- 3) Peningkatan kuantitas dan kualitas Aparat Hukum
- 4) Peningkatan pelaksanaan penegakan hukum yang tegas untuk memberantas penyalahgunaan narkoba, tindakan kejahatan yang meresahkan masyarakat, penghormatan, pemenuhan serta perlindungan HAM .
- 5) Penindakan pelanggaran perda, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan
- 6) Pengawasan dan pelaksanaan terhadap produk hukum pemerintah Provinsi Kab/Kota

## **8. Komunikasi dan Informatika**

### **1) Strategi 1 Pengembangan dan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Informasi serta Sarana dan Prasarana Binaan Wilayah**

#### *Arah Kebijakan :*

- 1) Pembangunan jaringan teknologi komunikasi dan informasi dilingkungan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 2) Adanya pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informatika.
- 3) Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi.
- 4) Penyebarluasan informasi penyelenggara pemerintah dan pembangunan.
- 5) Adanya forum bersama dengan KPID untuk pembentukan penertiban lembaga penyiaran daerah.
- 6) Peningkatan jangkauan siaran LPP TVRI Kaltim dan RRI Samarinda di wilayah Kaltim.

- 7) Peningkatan kualitas program dan produksi siaran TVRI Kaltim dan RRI Samarinda.
- 8) Peningkatan Sarana dan prasarana siaran TVRI Kaltim dan RRI Samarinda.
- 9) Peningkatan penertiban para pengguna frekuensi dan perusahaan jasa titipan yang beroperasi di Kaltim.

## 9. Perencanaan Pembangunan

### **Strategi 1** Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas dalam rangka Pembangunan yang Berkelanjutan

*Arah Kebijakan :*

- 1) Pengembangan data dan informasi sebagai bahan kajian dan evaluasi pembangunan.
- 2) Peningkatan kerjasama pembangunan.
- 3) Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan serta daerah peningkatan kemampuan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah.
- 4) Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat penyusunan rancangan RPJPD dan RKPD.
- 5) Peningkatan koordinasi perencanaan pembangunan ekodan sosial budaya
- 6) Peningkatan koordinasi perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam.

## Mewujudkan Ekonomi Daerah Berdaya Saing Pro Rakyat

### 1. Tata Ruang

#### **Strategi 1** Pengembangan Struktur Ruang Sesuai RTRW.

*Arah Kebijakan :*

- 1) Penetapan dan pelaksanaan Perda tentang RTRW Provinsi Kalimantan RDRT Kawasan strategis,
- 2) Tersusunnya dan ditetapkannya Perda tentang Peraturan Zonasi (Zoning Regulation).
- 3) Pelaksanaan kegiatan non kehutanan pada kawasan budidaya kehutanan.
- 4) Pemetaan kawasan pertanian dan hortikultura, air payau dan air tawar.
- 5) Pelaksanaan peraturan Gubernur tentang izin kuasa pertambangan.
- 6) Pelaksanaan program pengembangan ruang terbuka hijau perkotaan.
- 7) Pelaksanaan kawasan lindung pesisir laut pulau kecil.

## 2. Pertanian Tanaman Pangan

### Strategi 1 Peningkatan dan Percepatan Upaya Ketahanan Pangan.

*Arah Kebijakan :*

- 1) Peningkatan kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan program
- 2) Peningkatan penyuluhan ke Kabupaten/Kota dan peningkatan SDM Penyuluh.
- 3) Peningkatan pemenuhan infrastruktur pertanian yang mendukung sector pertanian
- 4) Pemenuhan kebutuhan pupuk dan optimalisasi lahan.
- 5) Peningkatan ketahanan pangan yang menyediakan, aksesibilitas dan stabilitasi pengadaan disamping aspek produksi, distribusi dan keamanan konsumsi

### Strategi 2 Peningkatan Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan

*Arah Kebijakan :*

- 1) Peningkatan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi.
- 2) Peningkatan sarana dan prasarana pertanian.
- 3) Pengembangan teknologi pertanian untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia Pelaku Pertanian Tanaman Pangan untuk menghasilkan produksi yang mempunyai daya saing.

## 3. Peternakan

### Strategi 1 Peningkatan Kuantitas dan Kualitas serta Pengembangan Peternakan

*Arah Kebijakan :*

- 1) Peningkatan peranan kelembagaan peternakan dalam mendukung ekonomi kerakyatan.
- 2) Peningkatan sarana dan prasarana peternakan
- 3) Pengembangan teknologi dan sistem pengelolaan peternakan untuk mendukung ekonomi kerakyatan
- 4) Pengembangan infrastruktur yang mendukung kelancaran usaha peternakan sarana produksi, pengolahan dan pemasaran sehingga dapat memenuhi kebutuhan lokal dan menjadi komoditas ekspor.
- 5) Peningkatan sumberdaya manusia peternakan
- 6) Pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya alam lokal yang mendukung pembangunan peternakan serta upaya pemanfaatan lahan pakan ternak ruminansia
- 7) Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan akan daging ternak dan telur.
- 8) Meningkatkan ketersediaan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan daging dan telur di Kalimantan Timur dan sekitarnya.
- 9) Meningkatkan hasil produksi peternakan dan sumber daya ternak andalan unggulan melalui peningkatan kelahiran dan penurunan angka kematian, peningkatan produksi dan produktifitas, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan, penyediaan bibit ternak unggul, perlindungan kesehatan hewan dan

kesehatan masyarakat veteriner, pengendalian pemotongan ternak betina produktif dan penanggulangan pengendalian gangguan reproduksi ternak.

- 10) Meningkatkan peranan peternak dalam mendukung ekonomi kerakyatan.
- 11) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak.

#### 4. Perkebunan

##### **Strategi 1 Pengembangan Perkebunan yang Berpotensi dan Bernilai Ekonomis Tinggi.**

*Arah Kebijakan :*

- 1) Pemanfaatan lahan tidur untuk diubah sebagai pengembangan yang produktif guna terwujudnya lahan perkebunan sejuta hektar.
- 2) Pengembangan sentra irigasi pada sector perkebunan yang potensial sebagai kutub pertumbuhan daerah sekitarnya.

##### **Strategi 2 Peningkatan Mutu dan Kualitas serta Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani.**

*Arah Kebijakan :*

- 1) Peningkatan kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia pada bidang perkebunan, didukung tingkat pendidikan yang memadai terutama dari pendidikan berbasis spesifikasi keahlian).
- 2) Peningkatan penggunaan teknologi budidaya dan tepat guna pada pengelolaan perkebunan.
- 3) Peningkatan pengelolaan komoditas perkebunan potensial melalui diversifikasi pengolahan hasil produksi (agroindustri terkait).
- 4) Peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan.

#### 5. Kelautan dan Perikanan

##### **Strategi 1: Peningkatan dan Pengembangan Perikanan untuk Memenuhi Kebutuhan Lokal dan Peningkatan Ekspor.**

*Arah Kebijakan :*

- 1) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia perikanan melalui pendidikan dan pelatihan bagi seluruh stakeholder kelautan dan perikanan.
- 2) Peningkatan pengembangan keahlian dalam mencetak tenaga kerja di sektor perikanan yang professional.
- 3) Peningkatan pemanfaatan potensi lahan.
- 4) Peningkatan ekspor komoditas perikanan.
- 5) Pembangunan industri pengolahan perikanan di beberapa Kabupaten/Kota

## **Strategi 2 Peningkatan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Serta Potensi Lahan Secara Optimal.**

*Arah Kebijakan :*

- 1) Peningkatan pengembangan kawasan pesisir dan pulau kecil serta penataan perumahan nelayan menjadi obyek wisata bahari.
- 2) Peningkatan pemanfaatan potensi lahan yang optimal guna peningkatan produk

## **6. Industri**

### **Strategi 1 Peningkatan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Melalui Perkelompokan**

*Arah Kebijakan*

- 1) Mengembangkan industri yang bertumpu pada potensi daerah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan terutama agro industri dengan prioritas pembinaan pada industri kecil, menengah dan rumah tangga
- 2) Mengembangkan Komoditas dengan pendekatan pengembangan klaster industri berbasis komoditi unggulan dan prospektif
- 3) Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai pada klaster dari industri yang bersangkutan
- 4) Meningkatkan nilai tambah produk/hasil industri sumberdaya yang digunakan industri
- 5) Meningkatkan pengawasan produk industri dalam rangka pengawasan SNI
- 6) Peningkatan industri kecil dan menengah berbasis industri rumah tangga sebagai bagian ekonomi kerakyatan.
- 7) Peningkatan sarana dan prasarana industri
- 8) Menumbuhkembangkan lingkungan bisnis yang nyaman dan kondusif

### **Strategi 2 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Industri dengan Memanfaatkan Sumberdaya alam yang Dimiliki sesuai dengan kondisi Daerah.**

*Arah Kebijakan :*

- 1) Penguatan penataan struktur industri yang melibatkan usaha industri hulu dan hilir serta keterkaitan antara IKM dan industri besar.
- 2) Pembangunan kawasan industri di beberapa Kabupaten/Kota dalam rangka pengembangan sentra industri potensial
- 3) Pengembangan cluster industri berbasis komoditas.
- 4) Penguatan kualitas sdm dengan kualitas produk sesuai dengan standar internasional (ISO).

**Strategi 3 Peningkatan Daya Saing Industri dan Keberlanjutan Industri.***Arah Kebijakan :*

- 1) Peningkatan keterampilan SDM, melalui standar kompetensi sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja industri.
- 2) Penguatan kapasitas kelembagaan penyedia tenaga kerja industri
- 3) Peningkatan promosi dan kerjasama investasi baik dalam negeri dan luar negeri
- 4) Peningkatan kemampuan industri dalam adaptasi dan pengembangan teknologi dalam proses produksi.

**7. Perdagangan****Strategi 1: Peningkatan Aktivitas Perdagangan Luar Negeri Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri***Arah Kebijakan:*

- 1) Pengembangan jaringan distribusi dan sistem informasi produk unggulan daerah
- 2) Penguatan kapasitas kelembagaan pasar dalam menjamin keadilan aktivitas usaha atau menjamin tidak adanya praktek monopoli dalam aktivitas perdagangan.
- 3) Peningkatan efisiensi dengan mengurangi biaya tinggi dalam kegiatan perdagangan.
- 4) Peningkatan pertumbuhan ekspor migas dan non migas berbasis produk unggulan daerah.
- 5) Pengembangan sentra pemasaran produk unggulan daerah dalam skala provinsi maupun kabupaten/kota guna meminimalkan impor baik migas maupun non migas.
- 6) Penguatan usaha dan lembaga perdagangan serta perlindungan terhadap konsumen dan pengamanan perdagangan untuk meningkatkan tertib usaha niaga, peningkatan daya saing, perluasan pasar ekspor dan promosi.
- 7) Peningkatan neraca perdagangan melalui kerjasama regional dan internasional
- 8) Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha industri dan aparatur pembina.

**8. Koperasi dan UKM****Strategi 1 Pemberian Peran yang Lebih Besar pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi yang Mampu Mengangkat citra Perekonomian Rakyat***Arah Kebijakan :*

- 1) Peningkatan kualitas dan kuantitas koperasi
- 2) Peningkatan investasi dan perdagangan dibidang usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi.
- 3) Peningkatan jumlah anggota koperasi.
- 4) Peningkatan peran UMKM dalam pengumpulan devisa melalui ekspor non migas melalui pengembangan SDM, mutu produksi serta desain dan kemasan.



- 5) Peningkatan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk percepatan pengembangan usaha UMKM dan menurunkan suku bunga.
- 6) Penguatan fasilitas pelayanan aktivitas usaha melalui penyederhanaan prosedur dan sistem.

## 9. Kebudayaan

### **Strategi 1 Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Kebudayaan.**

#### *Arah Kebijakan :*

- 1) Peningkatan pengembangan kebudayaan Kabupaten/Kota.
- 2) Peningkatan pengelolaan keragaman dan kekayaan kebudayaan di Kabupaten/Kota.
- 3) Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola kebudayaan di Kabupaten/Kota.
- 4) Peningkatan kerjasama penyelenggaraan budaya di Kabupaten/Kota.
- 5) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam rangka melestarikan budaya untuk menjadi daya tarik wisata.

## 10. Pariwisata

### **Strategi 1 Peningkatan dan Pengembangan Promosi Pariwisata.**

#### *Arah Kebijakan :*

- 6) Peningkatan promosi pariwisata dan kesenian serta kemitraan di Kabupaten/Kota.
- 7) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dan kesenian di Kabupaten/Kota.
- 8) Peningkatan obyek wisata di Kabupaten/Kota.
- 9) Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pariwisata dan kesenian di Kabupaten/Kota.
- 10) Peningkatan sumberdaya manusia bidang kepariwisataan.

## 11. Jalan dan Jembatan

### **Strategi 1 Pembangunan Prasarana Jalan dan Jembatan Berkualitas dan Merata Untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah**

#### *Arah Kebijakan*

- 1) Peningkatan kapasitas Jalan untuk menghubungkan pusat produksi dan pengembangan Kawasan Ekonomi Baru (sesuai dengan fungsi/peran jalan arteri kolektor).
- 2) Mengembangkan Wilayah perbatasan sebagai halaman depan wilayah Republik Indonesia, wilayah pedalaman dan wilayah tertinggal dengan meningkatkan aksesibilitas prasarana jalan dan jembatan kekawasan perbatasan dan pedalaman dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sosial dan ekonomi.

- 3) Meningkatkan efisiensi pelayanan jasa distribusi, menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah dengan membangun jalan bebas hambatan.
- 4) Pembangunan jembatan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan jalan antar Provinsi dan Kabupaten/Kota

## 11. Perhubungan Darat

**Strategi 1** Pemerataan pelayanan transportasi darat antar wilayah maupun di dalam wilayah perkotaan dan perdesaan

Arah Kebijakan:

- 1) Peningkatan aksesibilitas jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat aktivitas dan wilayah sekitarnya terutama dengan kawasan pedalaman dan perbatasan.
- 2) Peningkatan tingkat pelayanan dan pemeliharaan jalan.
- 3) Peningkatan fasilitas lalu lintas jalan di seluruh ruas jalan nasional dan provinsi.
- 4) Peningkatan fasilitas keselamatan angkutan darat.
- 5) Peningkatan terminal kota.
- 6) Pembangunan jembatan timbang di beberapa Kabupaten/Kota.
- 7) Pengembangan jaringan jalan kereta api untuk melayani kawasan pusat pengembangan kegiatan perkebunan kelapa sawit, karet dan pertambangan minyak, gas bumi dan batu bara.
- 8) Pengembangan jaringan jalan kereta api antar kota yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnya.
- 9) Pengembangan stasiun sebagai simpul jaringan kereta api.

## 12. Perhubungan Udara

**Strategi 1** Peningkatan Kualitas dan Kuantitas system Transportasi Udara untuk Pergerakan Internasional, Nasional maupun Lokal.

Arah Kebijakan ;

- 1) Pembangunan dan pengembangan beberapa bandara di Kabupaten/Kota.
- 2) Peningkatan kapasitas pelayanan transportasi udara yang tingkat aktifitasnya tinggi baik barang maupun penumpang.
- 3) Peningkatan fasilitas keselamatan di setiap bandara.

**13. Perhubungan Laut**

**Strategi 1 Peningkatan Kualits Maupun Kuantitas Sistem Transportasi Laut dan Menopang Kegiatan Ekspor Impor dan Berperan sebagai penghubung antar Ne Provinsi dan Kabupaten/Kota**

*Arah Kebijakan :*

- 1) Pembangunan dan pengembangan beberapa pelabuhan di Kabupaten/ Kota
- 2) Peningkatan kapasitas pelayanan transportasi pada kawasan yang tingkat aktifitasnya tinggi baik barang maupun penumpang.
- 3) Peningkatan fasilitas keselamatan pelayaran di setiap pelabuhan.

**14. Perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan**

**Strategi 1 Pembangunan dan Pengembangan Sarana ASDP untuk Menunjang Pergerakan Intermoda**

*Arah Kebijakan :*

- 1) Pembangunan dan pengembangan beberapa dermaga penyeberangan
- 2) Peningkatan kapasitas pelayanan transportasi pada kawasan yang tingkat aktifitasnya tinggi baik barang maupun penumpang.
- 3) Peningkatan fasilitas keselamatan angkutan sungai.

**15. Pengairan (Sumberdaya Air)**

**Strategi 1 : Pengembangan jaringan Irigasi, Jaringan Dahan Sawah dan Prasarana Pengendali Banjir**

*Arah Kebijakan :*

- 1) Peningkatan pengendalian banjir baik sarana dan prasarana serta waduk di beberapa Kabupaten/ Kota
- 2) Pengembangan dan pengabdian beberapa sarana irigasi, rawa dan tambak untuk mendukung program swasembada pangan.
- 3) Penebangan sawah baru pada lokasi potensial.
- 4) Peningkatan kelayakan dan rehabilitasi bendung/embung pengendali banjir.

**Strategi 2 Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Secara Bertahap dan Konservasi Sumberdaya Air**

*Arah Kebijakan*

- 1) Pengembangan dan pengelolaan bendung/embung sebagai air baku.
- 2) Peningkatan partisipasi masyarakat serta pengamanan pantai dan sungai dalam rangka penyelamatan air.
- 3) Pembangunan prasarana sumber daya air.

- 4) Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.
- 5) Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya

#### 16. Perumahan dan Permukiman

**Strategi 1: Pembangunan Perumahan dan Permukiman yang berwawasan Lingkungan, serta pemerataan Kebutuhan Hunian dan Layak Huni.**

*Arah Kebijakan :*

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana dasar perumahan sederhana sehat di Kaltim.
- 2) Peningkatan kualitas prasarana dan sarana dasar rumah masyarakat.
- 3) Penataan dan revitalisasi perumahan tidak layak huni.

#### 17. Air Bersih

**Strategi 1**

*Arah Kebijakan :*

- 1) Peningkatan cakupan layanan air bersih.
- 2) Peningkatan kinerja PDAM penyediaan dan pengelolaan air baku untuk air bersih secara intensif dilaksanakan.
- 3) Pembangunan beberapa prasarana air bersih.

#### 18. Investasi

**Strategi 1 Peningkatan investasi yang bersumber dari Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMA/PMDN)**

*Arah Kebijakan :*

- 1) Menciptakan iklim usaha yang kondusif..
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka perbaikan pelayanan perizinan penanaman modal secara bertahap.
- 3) Peningkatan pengembangan potensi investasi daerah dengan melakukan identifikasi peluang usaha sesuai dengan potensi daya alam daerah.
- 4) Peningkatan promosi investasi yang efektif terhadap pemilihan Negara sasaran promosi investasi yang tepat dengan menyajikan informasi investasi prospektif.
- 5) Peningkatan minat investor yang menanamkan modal khususnya di beberapa Kabupaten/Kota yang telah bekerjasama sesuai dengan potensi daerah.
- 6) Peningkatan fungsi pelayanan di bidang perijinan investasi berupa pemberian prinsip bagi PMA dan PMDN.

**19. Kehutanan****Strategi 1: Peningkatan Sumberdaya hutan yang mencukupi dan menjaga pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan***Arah Kebijakan:*

- 1) Pemberantasan pembalakan ilegal (illegal logging)
- 2) Penegakan hukum dan peningkatan pengawasan dan partisipasi para pihak kehutanan dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran.
- 3) Pemantapan kawasan hutan.
- 4) Perlindungan hutan adat
- 5) Penjagaan kawasan hutan lindung dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.
- 6) Perluasan informasi dan pendidikan tentang manfaat kelestarian hutan bagi masyarakat.
- 7) Peningkatan kualitas dan akses informasi Berdaya Hutan.

**Strategi 2: Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Hutan***Arah Kebijakan:*

- 1) Percepatan pemulihan lahan/DAS yang kritis dan meningkatkan partisipasi masyarakat
- 2) Peningkatan akses masyarakat setempat dalam pemanfaatan SDH dan melestarikannya.
- 3) Revitalisasi sektor kehutanan, utamanya industri pengolahan kayu
- 4) Peningkatan reboisasi hutan, HTI dan penanaman kembali hasil hutan ikutan.

**20. Pertambangan****Strategi 1: Penetapan Kebijakan dan Peraturan serta Sistem Pertambangan yang Berorientasi pada Pembangunan yang Berkelanjutan***Arah Kebijakan:*

- 1) Peningkatan kebijakan perijinan pertambangan batubara.
- 2) Percepatan Rencana Tata Ruang Wilayah Pertambangan Batubara.
- 3) Peningkatan sistem pengawasan terpadu pengelolaan pertambangan batubara.
- 4) Penerapan sistem Good Mining Practice.
- 5) Perlakuan sistem perencanaan tambang yang berkelanjutan.
- 6) Perlunya kebijakan khusus mengatur jalur transportasi batubara di luar area tambang.
- 7) Peningkatan pengawasan pertambangan batubara

## **Strategi 2: Peningkatan Kualitas Pengelolaan Tambang secara Efisien dan Efektif yang Ramah Lingkungan**

- 1) Adanya pencadangan batubara.
- 2) Pengendalian eksploitasi bahan tambang untuk menjaga cadangan dalam jangka panjang.
- 3) Intensifikasi pengelolaan Batubara sebagai bahan utama energi.
- 4) Percepatan penciptaan KP disertai penawaran kepada koperasi.
- 5) Pengolahan sisa tambang menjadi briket batubara
- 6) Pengawasan dan pembinaan pasca tambang untuk kawasan budidaya maupun kawasan lindung

## **21. Listrik**

### **Strategi 1 Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Listrik melalui Rehabilitasi, Repowering Pembangkit yang ada dan Pembangkit Baru serta Pengembangan diversifikasi Energi dengan Memanfaatkan Sumberdaya Alam yang Tersedia**

*Arah Kebijakan :*

- 1) Pembangunan Pembangkit listrik di beberapa Kabupaten/kota yang terdapat kebutuhan listrik.
- 2) Peningkatan kapasitas pembangkit listrik yang sudah beroperasi sehingga mampu mendukung pasokan listrik pada beban puncak.
- 3) Peningkatan penyediaan pembangkit listrik dengan jenis PLTD untuk penyediaan jangka pendek, maupun penyediaan mikro hidro dan mini hidro.
- 4) Penyediaan pembangkit listrik yang masuk ke dalam sistem layanan di wilayah Kalimantan Timur, seperti PLTG, CFK, PLTMG PLTS dan PLTU yang lebih sesuai sebagai upaya pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah
- 5) Peningkatan kerjasama antar pelaku kelistrikan

## **22. Lingkungan Hidup**

### **Strategi 1: Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tidak Melampaui Daya Dukung Lingkungan.**

*Arah Kebijakan :*

- 1) Peningkatan pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup
- 2) Pengelolaan sumberdaya alam dan pemeliharaan daya dukungnya agar lebih bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.
- 3) Peningkatan pelaksanaan penataan lingkungan dan penyelesaian kasus lingkungan.
- 4) Pemanfaatan data secara optimal informasi yang tertuang di dalam RTRW, AMD, NKLD dan NSDA dalam pengambilan kebijakan dan penyusunan program.

- 5) Peningkatan kualitas air dengan mencegah pembuangan limbah secara langsung ke badan sungai.
- 6) Peningkatan penanganan konflik lingkungan dengan upaya melengkapi dan mensosialisasikan peraturan lingkungan hidup kepada stakeholders.

## Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Kesejahteraan Sosial

### 1. Pendidikan

#### **Strategi 1 Penuntasan Program Wajib Belajar 12 Tahun Terutama di Wilayah Perdesaan, Pedalaman dan Perbatasan.**

*Arah Kebijakan :*

- 1) Perluasan subsidi pendidikan bagi seluruh peserta didik dalam usia wajib belajar.
- 2) Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan.
- 3) Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan untuk sekolah pada wajib belajar.
- 4) Peningkatan mutu dan profesionalisme tenaga pengajar sehingga mencapai standar pendidikan S1 dan memiliki sertifikasi sesuai standar mutu nasional.
- 5) perwujudan anggaran pendidikan sebesar 20 % se Kaltim.

#### **Strategi 2 Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Unggulan dan Kejuruan.**

*Arah Kebijakan:*

- 1) Pengembangan sekolah percontohan pada setiap jenjang pendidikan melalui penyediaan prasarana dan sarana pendidikan, dan tenaga yang berkualitas pada setiap kabupaten/kota.
- 2) Pengembangan pendidikan kejuruan dan keahlian sesuai kebutuhan pasar kerja setingkat SMU dan perguruan tinggi yang mampu bersaing di pasar global.
- 3) Peningkatan mutu pendidikan untuk mencapai standar nasional melalui pengembangan kurikulum berbasis kompetensi.
- 4) Pengembangan kerjasama dan jejaring pendidikan dengan sekolah unggulan nasional dan internasional.
- 5) Pengembangan sekolah unggulan yang bertaraf internasional (boarding school)

#### **Strategi 3 Perluasan Lembaga Pendidikan Formal Non Formal dan Pendidikan Informal Setingkat Perguruan Tinggi Bermutu Kalimantan Timur**

*Arah Kebijakan:*

- 1) Pengembangan lembaga pendidikan sesuai permintaan tenaga kerja
- 2) Percepatan pengembangan lembaga pendidikan di daerah yang kurang berkembang.

- 3) Pengembangan system dan standar pendidikan yang bertumpu pada standar nasional.

#### **Strategi 4**

*Arah Kebijakan :*

- 1) Memperluas akses bagi anak usia dini, melalui pemerataan dan peningkatan pelayanan yang akuntabel terhadap masyarakat.
- 2) Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, melalui pengembangan pendidikan umum/kejuruan dan agama, pengembangan pendidikan non formal, pemuda olahraga baik pendidikan di luar sekolah melalui paket A, B, C dan sertifikasi kursus.
- 3) Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan yang mampu menunjang peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa.
- 4) Peningkatan manajemen pendidikan.
- 5) Pembinaan dan pengembangan Perguruan Tinggi.

## **2. Kesehatan**

**Strategi 1 Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Kesehatan melalui Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Pentingnya Kesehatan Sebagai Upaya untuk Menurunkan Angka Kematian dan Meningkatkan Usia Harapan Hidup**

*Arah Kebijakan :*

- 1). Peningkatan Pencapaian derajat kesehatan melalui promosi gaya hidup s
- 2). Pemberdayaan perempuan dan keluarga dalam meningkatkan mutu kesehatan keluarga.

**Strategi 2 Pencegahan Penyakit Menular dan Wabah Sejak Dini dengan Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan dan Berperilaku Hidup Bersih Sehat.**

*Arah Kebijakan :*

- 1) Peningkatan upaya pencegahan penyakit melalui pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat.
- 2) Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dengan meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat.
- 3) Peningkatan teknologi dan pengetahuan dalam bidang kesehatan untuk mencegah penyakit.
- 4) Peningkatan hygiene sanitasi lingkungan perumahan dan tempat umum lainnya.

**Strategi 3 : Meningkatkan Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat**

*Arah Kebijakan :*



- 1) Mengembangkan pelayanan dan penyediaan obat, makanan serta melindungi masyarakat dari bahan berbahaya.
- 2) Meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan rumah sakit serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya serta mengembangkan jaringan pelayanan kesehatan yang terintegrasi
- 3) Memenuhi kebutuhan, meningkatkan mutu profesionalisme tenaga kesehatan.
- 4) Mengembangkan system pembiayaan pelayanan kesehatan yang berbasis sistem pra upaya/asuransi/JPKM.
- 5) Memberikan pembiayaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin dengan system JPKM.
- 6) Penyediaan pelayanan puskesmas 24 jam yang lengkap dengan ruang rawat inap dan UGD.
- 7) Peningkatan dan pemerataan tenaga medis dan para medis di setiap Kabupaten/Kota sampai ke pedalaman dan perbatasan.

### 3. Agama

#### **Strategi 1 Peningkatan Pelayanan Kegiatan Ibadah Umat dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Keagamaan.**

##### *Arah Kebijakan:*

- 1) Peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama sesuai dengan masing-masing
- 2) Peningkatan pembangunan fasilitas ibadah.
- 3) Peningkatan kualitas penyelenggaraan haji dan umroh.
- 4) Peningkatan pelayanan dan pemahaman kehidupan beragama.

#### **Strategi 2 Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama bagi Setiap Individu dan Masyarakat dalam Melaksanakan Pembangunan Daerah.**

##### *Arah Kebijakan:*

- 1) Penjaminan kebebasan dan perluasan kesempatan pelaksanaan ajaran agama
- 2) Peningkatan SDM serta kuantitas dan kualitas fasilitas pendidikan maupun lembaga sosial berbasis keagamaan
- 3) Peningkatan kegiatan keagamaan bagi setiap pemeluk agama

#### **Strategi 3 Peningkatan dan Memantapkan Kerukunan, Pemahaman, dan Pengamalan Ajaran Agama Sehingga Para Pemeluk Agama Dapat Berperan Sebagai Landasan Moral dan Etik dalam Pembangunan.**

##### *Arah Kebijakan:*

- 1) Peningkatan kerukunan antar umat beragama.

- 2) Peningkatan kegiatan dan pemantapan antar umat beragama maupun secara internal bagi tiap pemeluk agama.
- 3) Peningkatan peranan tokoh agama dalam segala kegiatan.

#### 4. Pemuda, Wanita dan Olah Raga

##### **Strategi 1: Peningkatan Peran Fungsi Pemuda dalam Kegiatan Pembangunan.**

###### *Arah Kebijakan:*

- 1) Peningkatan kegiatan dan organisasi kepemudaan untuk mendorong kepedulian pada berbagai permasalahan pembangunan
- 2) Peningkatan fungsi dan peran lembaga kepemudaan dalam menampung aspirasi pemuda
- 3) Pembinaan pengembangan kebudayaan
- 4) Peningkatan mutu dan kualitas pemuda yang dimulai dengan mendorong kepeloporan dan kemandirian generasi muda.
- 5) Peningkatan peran dan kesempatan pemuda untuk memperoleh keterampilan.

##### **Strategi 2: Peningkatan Prestasi Olahraga Masyarakat melalui Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Olah Raga.**

###### *Arah Kebijakan:*

- 1) Peningkatan sarana olahraga
- 2) Peningkatan kegiatan olahraga andalan
- 3) Peningkatan SDM (pembina, pelatih dan olahragawan) di Kota sehingga dapat diraih prestasi nasional internasional.
- 4) Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan olahraga pada berbagai instansi organisasi kepemudaan
- 5) Peningkatan apresiasi terhadap pengembangan olahraga masyarakat dan olahraga tradisional.
- 6) Perwujudan sekolah olahraga dengan *systeming school*.
- 7) Pengembangan manajemen olahraga.
- 8) Peningkatan peran dan fungsi serta kualitas tenaga pelatih dari tempat pelatihan atau pembinaan cabang olahraga.

#### 5. Pemberdayaan Masyarakat

##### **Strategi 1 : Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya Peningkatan Kemandirian Bekerja Dan Berusaha Serta Berperan Aktif Dalam Pembangunan.**

###### *Arah Kebijakan :*

- 1) Peningkatan usaha ekonomi masyarakat.
- 2) Peningkatan peran kelembagaan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan secara partisipatif
- 3) Peningkatan pembinaan aparatur desa/kampung.

- 4) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui pengembangan kemampuan kerja dan berusaha.
- 5) Peningkatan peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan.

**Strategi 2 Peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan**

*Arah Kebijakan :*

- 1) Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya lokal.
- 2) Peningkatan pemanfaatan teknologi guna berwawasan lingkungan.
- 3) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas.

**Strategi 3 : Percepatan Penanggulangan Kemiskinan**

*Arah Kebijakan :*

- 1) Peningkatan Pemberdayaan dan mengembangkan kemampuan masyarakat
- 2) Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat beasiswa dan pelayanan kesehatan secara gratis bagi keluarga tidak mampu.
- 3) Pengembangan usaha dan lapangan kerja
- 4) Memperluas partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan penanggulangan kemiskinan

**6. Kesejahteraan Sosial**

**Strategi 1 Peningkatkan pembinaan dan kualitas pelayanan serta bantuan dan terhadap anak terlantar, anak asuh, penyandang cacat, penduduk lanjut usia komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.**

*Arah Kebijakan:*

- 1) Peningkatan jaminan dan perlindungan sosial keluarga/fakir miskin dan penyandang cacat
- 2) Pemberdayaan anak terlantar, anak jalanan, dan anak cacat dengan menjamin membekali kemampuan tumbuh kembang anak secara wajar agar diterima di lingkungannya
- 3) Perwujudan pemberdayaan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar
- 4) Peningkatan sumberdaya manusia pengelola kesejahteraan sosial
- 5) Perluasan jangkauan pelayanan sosial
- 6) Pemberdayaan komunitas adat terpencil dengan meningkatkan kesejahteraan sosialnya dengan hidup mandiri dalam suatu lingkungan permukiman
- 7) Pemberdayaan dan bantuan bagi korban tindak kekerasan dan pekerja migran dengan membantu dan membekali keterampilan kesejahteraan

- 8) Pelayanan dan rehabilitasi bagi korban NAPZA, eks NAPI, dan eks wanita tawanan, serta mengembalikan korban ke kehidupan yang normal dan diterima di lingkungan sosialnya

## 7. Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

**Strategi 1** Peningkatan kesetaraan gender, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.

*Arah Kebijakan:*

- 1) Peningkatan peran aktif perempuan dalam bidang pembangunan
- 2) Peningkatan pendidikan perempuan.
- 3) Peningkatan partisipasi perempuan di legislative.
- 4) Peningkatan partisipasi perempuan yang meratifikasi pemerintahan.
- 5) Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan sebagai salah satu bagian dari sumberdaya manusia terpelatihan tenaga kerja wanita.
- 6) Peningkatan kualitas dan kesejahteraan, perlindungan anak
- 7) Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

**Strategi 2 :** Peningkatan kualitas pelayanan Keluarga Berencana (KB), dalam mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera serta Kependudukan.

*Arah Kebijakan*

- 1) Pemenuhan permintaan masyarakat akan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi
- 2) Peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga, penurunan angka kelahiran.
- 3) Pembinaan kemandirian, peningkatan keterampilan dan mutu layanan KB, dan kesehatan reproduksi
- 4) Pemberian informasi penggunaan alat kontrasepsi kepada pasangan usia subur dan remaja; maupun KB mandiri.
- 5) Peningkatan sosialisasi program keluarga berencana sampai pedalaman dan perbatasan.
- 6) Peningkatan pembentukan kelembagaan program KB di Kabupaten/Kota.
- 7) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga lapangan PLKB di Kabupaten/Kota, yaitu rata-rata (satu) orang PLKB/PKB membina lebih dari 5 (lima) desa (desa) 5

## 8. Tenaga Kerja dan Transmigrasi

**Strategi 1** Peningkatan Pemenuhan Tenaga Kerja sesuai dengan Pasar Kerja Dalam Negeri maupun Luar Negeri dalam upaya mengantisipasi meningkatnya jumlah Angkatan Kerja

*Arah Kebijakan:*

- 1) Peningkatan mutu prasarana dan sarana lembaga pelatihan dan lembaga sertifikasi (Lembaga Sertifikasi kompetensi/LKS) yang kompeten dan mampu menciptakan tenaga kerja yang berkualitas.
- 2) Peningkatan kerjasama kegiatan bursa kerja, pelatihan, sertifikasi dan penempatan TK dengan lembaga pelatihan kerja, perguruan tinggi, lembaga ketenagakerjaan swasta/masyarakat.

**Strategi 2 Peningkatan Peluang Usaha yang Memiliki Daya Saing Tinggi Dengan Mengutamakan Penyerapan Tenaga Kerja Sesuai dalam upaya mengurangi pengangguran.**

*Arah Kebijakan:*

- 1) Memberdayakan dan revitalisasi lembaga pelatihan dalam rangka meningkatkan peran serta dalam menciptakan TK yang mandiri, terampil dan berdaya saing.
- 2) Menyediakan/memperluas lapangan kerja bagi pencari kerja yang memiliki kompetensi kerja sehingga meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
- 3) Meningkatkan kompetensi pencari kerja sesuai kesempatan kerja yang tersedia.
- 4) Menciptakan perluasan lapangan kerja sesuai potensi kawasan perbatasan dan pembangunan pertanian arti luas (Perkebunan, Kelautan dan Perikanan, dan sektor lain sesuai unggulan daerah).
- 5) Perluasan kesempatan kerja melalui kegiatan padat karya dan usaha produktif.
- 6) Meningkatkan pembangunan sektor riil.

**Strategi 3 Peningkatan Kelembagaan dan Penciptaan Pasar Kerja yang Fleksibel**

*Arah Kebijakan:*

- 1) Penguatan kelembagaan Badan Sertifikasi Profesi.
- 2) Peningkatan peran dan kualitas stakeholders dalam perlindungan tenaga kerja
- 3) Perbaikan sistem pengawasan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja dalam dan luar negeri
- 4) Peningkatan kualitas keselamatan dan kesehatan kerja
- 5) Terwujudnya hubungan industrial yang kondusif dan peningkatan peran lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial

**Strategi 4 Pembentukan Permukiman Transmigrasi yang Mandiri**

*Arah Kebijakan:*

- 1) Peningkatan hubungan antar permukiman transmigrasi dan pusat pemasaran
- 2) Pengembangan sarana dan prasarana permukiman transmigrasi yang mendukung pembentukan hubungan antar pusat permukiman
- 3) Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh melalui program transmigrasi

- 4) Mewujudkan ketahanan pangan dan ~~melalui~~ program transmigrasi
- 5) Percepatan pembangunan Kawasan Transmigrasi Mandiri ( KTM ) perbatasan.